



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENURUNAN PRODUKSI MINYAK MENTAH NASIONAL

Niken Paramita Purwanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tindakan pemboran sumur minyak mentah yang dilakukan selama ini belum cukup untuk mendorong produksi minyak mentah nasional. Meskipun program yang dimulai sejak tahun 2021 berhasil mengurangi penurunan alami dari 5%-7% menjadi 1,1%-1,2% per tahun, produksi minyak mentah nasional per tanggal 7 Juni 2024 mencatatkan 610.750 barel per hari dari target 635.000 barel per hari. SKK Migas telah merancang berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini. Strategi jangka pendek, antara lain, dengan meningkatkan pemboran sumur pengembangan, *workover*, dan layanan sumur di lapangan yang sudah ada. Sedangkan strategi jangka menengah berfokus pada mempercepat penemuan cadangan baru dan implementasi proyek pemulihan minyak mentah (*enhancing oil recovery*).

Namun, ada kekhawatiran terhadap produksi minyak mentah dari wilayah kerja Blok Rokan dan Blok Cepu yang saat ini mengalami penurunan produksi alami. Kedua blok ini tetap menjadi tulang punggung produksi minyak mentah nasional sehingga masalah di sini dapat berdampak signifikan terhadap produksi minyak mentah secara keseluruhan. SKK Migas memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan di kedua wilayah kerja ini. Saat ini, SKK Migas terus bermitra dengan PT Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan pemboran secara besar-besaran guna meningkatkan produksi minyak mentah dari Blok Rokan. Hasilnya, produksi minyak mentah di wilayah kerja ini dapat meningkat menjadi sekitar 162.000 barel per hari, menjadikannya sebagai blok migas penyumbang produksi minyak mentah terbanyak di Indonesia. Situasi serupa juga terjadi di Blok Cepu, di mana cadangan minyak mentah dalam jumlah besar terakhir kali ditemukan pada awal 2000-an. Blok Cepu juga mengalami penurunan produksi alami sejak periode 2020-2022, dan SKK Migas serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sedang mencoba untuk menahan penurunan tersebut dengan melakukan uji produksi maksimal. Di masa mendatang, SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mengoperasikan blok tersebut berencana merealisasikan Proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) dengan target meningkatkan produksi sebanyak 16.000 barel per hari, yang diharapkan dapat dimulai pada bulan Agustus tahun 2024 ini.

Di sisi lain, Kementerian ESDM berupaya memberikan dorongan melalui kebijakan insentif untuk menghidupkan kembali industri hulu migas nasional. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyempurnaan kebijakan dan insentif untuk membuat eksplorasi lebih menarik. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan baru, yaitu *pertama*, ada peningkatan dalam ketentuan lelang dan kontrak blok migas yang mencakup pembagian kontraktor hingga 50%, bonus tanda tangan minimum, lelang langsung blok migas tanpa studi bersama, serta penawaran garansi bank yang lebih terjangkau. Selain itu, ada kebebasan bagi kontraktor untuk memilih antara skema bagi hasil *gross split* atau *cost recovery*. *Kedua*, kebijakan ini mencakup hak eksplorasi di mana KKKS dapat memindahkan komitmen eksplorasi ke wilayah terbuka di luar blok yang sedang dikerjakan. Perpanjangan jangka waktu eksplorasi menjadi 10 tahun juga dipertimbangkan serta kemungkinan tambahan waktu eksplorasi lebih dari 10 tahun untuk

mendukung penemuan seperti gas North Ganal. *Ketiga*, pemerintah sedang menyempurnakan insentif hulu migas sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 199 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dengan fokus pada perbaikan pembagian kontraktor, kredit investasi, percepatan perhitungan depresiasi, dan penyesuaian parameter ekonomi lainnya. Pemerintah juga mempertimbangkan *split* tambahan untuk migas nonkonvensional serta revisi perpajakan untuk kegiatan hulu migas melalui PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Ketergantungan Indonesia terhadap lapangan migas yang sudah matang (tua) menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk mencapai target produksi. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, memperingatkan bahwa untuk mencapai target *lifting* minyak mentah nasional akan sulit jika hanya mengandalkan lapangan *existing* seperti Blok Rokan dan Blok Cepu. Tingginya angka penurunan alami di kedua blok inilah yang mendorong pemerintah untuk terus menurunkan target *lifting* nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya eksplorasi yang lebih intensif untuk menemukan cadangan baru yang dapat dioptimalkan.

Atensi DPR

Ketergantungan Indonesia terhadap lapangan migas yang sudah tua menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk mencapai target produksi minyak mentah nasional. Tindakan pemboran yang dilakukan selama ini belum cukup untuk mendorong produksi minyak mentah nasional. SKK Migas telah merancang berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini. Strategi jangka pendek, yaitu meningkatkan pemboran sumur pengembangan, *workover*, dan layanan sumur di lapangan yang sudah ada. Sedangkan strategi jangka menengah berfokus pada mempercepat penemuan cadangan baru dan implementasi proyek pemulihan minyak mentah. Komisi VII DPR RI perlu terus memantau berbagai aspek terkait kebijakan untuk menghidupkan kembali industri hulu migas nasional dengan melakukan penyempurnaan kebijakan dan insentif untuk membuat eksplorasi lebih menarik. Komisi VII DPR RI juga perlu terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam kerja sama antar lembaga dan perusahaan untuk mengatasi tantangan produksi minyak mentah nasional dalam menghadapi dinamika global dan tekanan ekonomi domestik.

Sumber

Bisnis Indonesia, 13 Juni 2024;
koran.bisnis.com, 12 Juni 2024; dan
rri.co.id, 12 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.